



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 55 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 127 TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Nomenklatur Jabatan dan Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6756);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 421);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 127 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 127) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Siak:

- a. Nomor 100 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 100);
 - b. Nomor 152 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 152);
 - c. Nomor 183 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 183);
 - d. Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 65);
 - e. Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 63);
- diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 07 Februari 2022**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 07 Februari 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

**Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2022 NOMOR

PERUBAHAN KENAM HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK

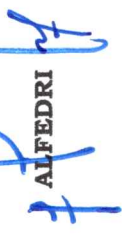
No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	a. Sekretaris Daerah	1						
	b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1						
	c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1						
	d. Asisten Administrasi Umum	1						
	e. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	1						
	f. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	1						
	g. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	1						
	a. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama		1			3		
	1) JF Analisis Kebijakan Ahli Muda							
	2) Analisis Pemerintahan Daerah				3			
	3) Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah				3			
	4) Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				2			
	5) Analisis Kerjasama Lintas Sektor				2			
	6) Pengelola Administrasi Pemerintahan				2			
	7) Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				2			
	8) Pengelola Informasi Kerjasama				3			
	9) Pengadministrasi Pemerintahan				2			
	10) Pengadministrasi Otonomi Daerah				2			
	b. Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan dan Fasilitas Pertanian		1					
	1) JF Analisis Kebijakan Ahli Muda					3		
	2) Analisis Peta Wilayah				1			
	3) Analisis Toponimi dan Data Wilayah				1			
	4) Analisis Pertanian				1			
	5) Pemeriksa Pertanian				1			
	6) Pengelola Toponimi				1			
	7) Pengelola Data Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Pertanian				1			
	8) Pengelola Data Hak Atas Tanah				1			
	9) Pengadministrasi Pertanian				1			
	10) Petugas Ukur				3			
	c. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat		1					
	1) JF Analisis Kebijakan Ahli Muda					2		
	2) Penyusun Bahan Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus atau Umrah				2			
	3) Penyusun Bahan Pembinaan Musabaqah				1			
	4) Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat				1			
	5) Analisis Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Beasiswa				2			

1	2	3	4	5	6	7	8
	6) Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan				2		
	7) Pengelola Bantuan Sosial Hibah				3		
	8) Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial				2		
	9) Pemandu Kerukunan Umat Beragama				3		
	10) Pengadministrasi Umum				8		
	d. Kepala Bagian Hukum		1				
	1) JF Analis Hukum Ahli Muda					1	
	2) JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama					2	
	3) JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda					2	
	4) JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya					2	
	5) JF Penyuluh Hukum Ahli Pertama					15	
	6) JF Penyuluh Hukum Ahli Muda					8	
	7) JF Penyuluh Hukum Ahli Madya					5	
	8) Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan				2		
	9) Analis Advokasi Hukum				3		
	10) Analis Pelindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia				1		
	11) Analis Sistem Informasi dan Jaringan				2		
	12) Penyusun Rancangan Perundang-Undangan				2		
	13) Pengelola Peraturan Perundang-Undangan				2		
	14) Pengolah Data Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum				2		
	15) Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan				2		
	16) Pengadministrasi Hukum				2		
	e. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		1				
	1) JF Analis Kebijakan Ahli Muda					3	
	2) Penelaah Perkembangan BUMD				2		
	3) Penelaah Data Sumber Daya Alam				2		
	4) Penyusun Rencana Sarana Pengembangan Usaha				2		
	5) Pengolah Data Informasi BLU				2		
	6) Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi				2		
	7) Pengelola Kelayakan Sumber Daya Alam				2		
	8) Pengadministrasi Program dan Kerjasama				2		
	9) Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha				1		
	f. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan		1				
	1) JF Perencana Ahli Muda					3	
	2) Analis Rencana Program dan Kegiatan				1		
	3) Analis Perencanaan Anggaran				1		
	4) Analis Data dan Informasi				1		
	5) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan				3		
	6) Pengelola Pengawasan				1		
	7) Pengadministrasi Perencanaan dan Program				2		
	8) Pengadministrasi Anggaran				2		
	g. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		1				
	1) JF Analis Kebijakan Ahli Muda					2	
	2) JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama					21	
	3) JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda					10	
	4) JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya					2	
	5) Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa				18		

1	2	3	4	5	6	7	8
	6) Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa				2		
	7) Analisis Lelang				3		
	8) Analisis Data dan Informasi				4		
	9) Analisis Pengembangan SDM Aparatur				1		
	10) Pengelola Unit Layanan Pengadaan				2		
	11) Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik				3		
	12) Pengadministrasi Persuratan				1		
	13) Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik		1		1		
	h. Kepala Bagian Umum						
	1) JF Analisis Kepegawaian Ahli Muda					1	
	2) JF Analisis Kebijakan Ahli Muda					1	
	3) JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda					1	
	4) Bendahara				1		
	5) Analisis Tata Usaha				3		
	6) Analisis Aset Daerah				33		
	7) Analisis Laporan Keuangan				3		
	8) Penyusun Laporan Keuangan				4		
	9) Verifikator Keuangan				5		
	10) Ajudan				4		
	11) Sekretaris				6		
	12) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor				2		
	13) Pengelola Perjalanan Dinas				3		
	14) Pengelola Gaji				3		
	15) Pengadministrasi Keuangan				3		
	16) Pengadministrasi Persuratan				4		
	17) Pengadministrasi Kepegawaian				3		
	18) Pengadministrasi Sarana dan Prasarana				5		
	19) Pranata Jamuan				4		
	20) Operator Mesin				3		
	21) Pengemudi				5		
	22) Penjaga Asrama				3		
	i. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		1				
	1) Kepala Sub Bagian Protokol			1			
	1) Analisis Protokol				2		
	2) Petugas Protokol				8		
	3) Pranata Acara				4		
	4) Pengadministrasi Rapat				2		
	2) Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Komunikasi Pimpinan			1			
	1) Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi				5		
	2) Pengolah Informasi dan Komunikasi				4		
	3) Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media				4		
	j. Kepala Bagian Organisasi		1				
	1) JF Analisis Kepegawaian Ahli Muda					2	
	2) JF Analisis Kebijakan Ahli Muda					1	
	3) Analisis Kelembagaan				2		
	4) Analisis Jabatan				2		
	5) Analisis Kompetensi				2		

1	2	3	4	5	6	7	8
	6) Analisis Tata Laksana				2		
	7) Analisis Pelayanan Publik				2		
	8) Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja				2		
	9) Penyusun Bahan Kebijakan				2		
	10) Pengevaluasi Program dan Kinerja				2		
	11) Pengolah Data Kelembagaan				2		
	12) Pengolah Data				4		
	13) Pengadministrasi Pemerintahan				2		
	14) Pengadministrasi Umum				2		
	Jumlah	7	10	2	287	90	
	Jumlah Total			396			

BUPATI SIAK

ALFEDRI